

GOOD SCOUT GOVERNANCE :

STANDAR MUTU & AKUNTABILITAS TATA KELOLA GERAKAN PRAMUKA

Prof DR. Ir. SRI PURYONO

Wakil Ketua Kwarnas,

Ketua Komisi Perencanaan dan Pengembangan Kwarnas Gerakan Pramuka

Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang

UU No. 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Pasal 4 menyebutkan Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.



Upaya mencapai tujuan Gerakan Pramuka, dilaksanakan dengan berbagai jalan, salah satunya adalah penerapan tata kelola yang sistematis dari tingkat nasional hingga gugus depan. Tata kelola dimaksud tidak hanya menyangkut struktur organisasi, namun juga prosedur, mekanisme dan metode perencanaan, pemrograman dan penganggaran, hingga pengembangan budaya dan norma organisasi yang sejalan dengan kode kehormatan Pramuka. Tata kelola dimaksud juga termasuk kemampuan melibatkan berbagai kalangan masyarakat dan pemerintah.

Sejalan dengan tantangan yang makin kompleks Gerakan Pramuka dituntut untuk terus mengembangkan tata kelola. Salah satu strateginya dengan menerapkan model dan standar *good governance*, sebagai standar jaminan mutu dan akuntabilitas tata kelola Gerakan Pramuka.

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE

United Nation Development Programme (UNDP), menjelaskan adanya empat pilar atau prinsip utama yang menggambarkan tata kelola kelembagaan yang baik.

Keempat prinsip atau pilar *Good Governance* yang dapat diadopsi dalam praktek *good scout governance* terdiri dari :

Akuntabilitas (*accountability*): adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara priodik keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dalam mencapai visi dan misi organisasi .

Transparansi (*transparency*) : tata kelola organisasi bersifat transparan kepada semua pemangku kepentingan baik pada level pusat, daerah, cabang maupun ranting. Transparansi tata kelola adalah keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses informasi organisasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.

Keterbukaan: terbukanya kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan saran, masukan, tanggapan dan kritik terhadap berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pengelola organisasi. Hal itu sebagai bentuk keterbukaan dan membangun partisipasi semua pihak terkait.

Aturan hukum (*rule of law*): tata kelola organisasi yang baik mempunyai karakteristik adanya jaminan ketersediaan, kepastian dan kepatuhan terhadap norma hukum dan regulasi yang mampu mendukung secara optimal pencapaian visi dan misi organisasi.

GSAT

Global Support Assessment Tool (GSAT) dari SGS, merupakan salah satu program WOSM untuk melakukan audit mutu tata kelola NSO (*National Scout Organization*). Program ini bertujuan menilai kepatuhan tata kelola organisasi kepanduan di tingkat nasional berdasar standar mutu yang ditetapkan secara internasional.

GSAT dilakukan dengan cara menilai dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan tata kelola *National Scouting Organization* (NSO), agar dapat terus berkembang dan berkelanjutan. Disamping juga untuk meningkatkan efektifitas tata kelola kelembagaan serta meningkatkan mutu dan akuntabilitas publik satuan organisasi kepramukaan di tingkat nasional.

Terdapat 10 dimensi kunci dalam tata kelola NSO menurut GSAT yaitu: standar mutu dan persyaratan tata kelola kelembagaan, penerapan kerangka dan prinsip tata kelola, kerangka manajemen atau perencanaan strategis, standar kinerja dan pakta integritas.

Prinsip berikutnya adalah : Advokasi, komunikasi publik & strategi branding, Pengelolaan anggota dewasa, Alokasi sumber daya keuangan organisasi, Pembinaan anggota muda, Potensi pertumbuhan organisasi, Peningkatan kualitas organisasi secara berkesinambungan.

GOOD SCOUT GOVERNANCE

Good Scout Governance merupakan sistem dan budaya yang diterapkan untuk mengarahkan dan mengendalikan mutu tata kelola berbagai satuan organisasi Gerakan Pramuka. Hal itu agar pengelolaan setiap satuan organisasi dapat berjalan secara sinergis, dinamis dan mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Scout good governance juga mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Gerakan Pramuka. Agar dengan demikian semua pemangku kepentingan dapat berkontribusi dan berpartisipasi secara optimal.

Scout good governance merupakan prinsip tata kelola Gerakan Pramuka yang baik, berorientasi kedepan, kolaboratif dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan regulasi atau peraturan organisasi yang solid dan fleksibel.

Keempat prinsip dimaksud diterapkan di semua satuan organisasi maupun satuan pendidikan Gerakan Pramuka. Penerapannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing satuan, dengan harapan dapat mendorong kemajuan, konsolidasi dukungan, partisipasi masyarakat serta mampu memecahkan berbagai persoalan.

BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan pilar penting dalam penerapan *Scout good governance*. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai dan norma yang dianut dalam penyelenggaraan tata kelola organisasi. Budaya organisasi setiap satuan organisasi Gerakan Pramuka berbasis kode kehormatan, agar dinamis, partisipatif, progresif dan solid.

Kode Kehormatan Pramuka adalah norma yang berlaku dalam kehidupan pramuka dan menjadi standar tingkah laku baik dalam berorganisasi, pergaulan sosial, maupun bermasyarakat. Kode kehormatan terdiri dari Satya Pramuka serta Darma Pramuka. Satya Pramuka berisikan janji anggota pramuka. Sedangkan Darma Pramuka berisikan tentang ketentuan moral.

Tantangan utama setiap satuan organisasi Gerakan Pramuka adalah membangun budaya organisasi berbasis kode kehormatan. Dengan kata lain menjadikan kode kehormatan tidak hanya sebagai janji dan satya, tetapi juga menjadi pakta integritas atau kode etik berorganisasi. Berbasis kode kehormatan sebagai pakta integritas, diharapkan setiap individu pengelola Gerakan Pramuka dapat bertindak profesional dan penuh tanggungjawab meskipun bekerja dengan sukarela dan dilandasi semangat pengabdian.

ORGANISASI GERAKAN YANG PARTISIPATIF

Tata kelola Gerakan Pramuka harus mampu menjadi organisasi gerakan yang dinamis dan partisipatif. Sebagai gerakan pendidikan, tata kelolanya harus terus bergerak merespon perkembangan jaman yang selalu berubah. Layanan pendidikan kepramukaan harus mampu membekali peserta didik menghadapi tantangan jaman. Tanpa layanan pendidikan yang dinamis dan progresif, maka keberlanjutan kepramukaan tidak bisa dipertahankan.

"Ask the Boy" merupakan arahan Baden Powell agar segenap pengembangan kegiatan dan pendidikan kepramukaan senantiasa bertanya kepada peserta didik sebagai pengguna. Arahan di atas sekaligus mencerminkan pentingnya budaya partisipatif dalam pembinaan dan pengembangan tata kelola Gerakan Pramuka secara keseluruhan.

Tata kelola Gerakan Pramuka harus mampu membuka ruang partisipasi dan kolaborasi dengan masyarakat secara luas. Untuk mencapai hal itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik sangat penting. Transparansi dan akuntabilitas akan membangun kepercayaan publik, jika publik sudah menaruh kepercayaan maka akan lahir partisipasi, demikian seterusnya.

KEMITRAAN DAN KERJASAMA

Kemitraan dan kerjasama dibangun atas dasar prinsip transparansi. Prinsip ini diterapkan dengan membangun kepercayaan timbal balik antara Gerakan Pramuka dengan pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan memperoleh informasi yang akurat dan memadai.



Kemampuan menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan perlu terus dikembangkan. Untuk itu tata kelola Gerakan Pramuka harus inovatif dan mampu menyajikan program maupun layanan pendidikan yang dirasakan manfaatnya oleh para pemangku kepentingan.

Nilai manfaat Gerakan Pramuka yang bisa dirasakan dan dilihat secara nyata akan menggerakkan para pemangku kepentingan bekerjasama dan bermitra memberikan dukungan. Tumbuhnya kemitraan dan kerjasama akan memperkuat tata kelola Gerakan Pramuka sehingga dapat terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

RENCANA STRATEGIS

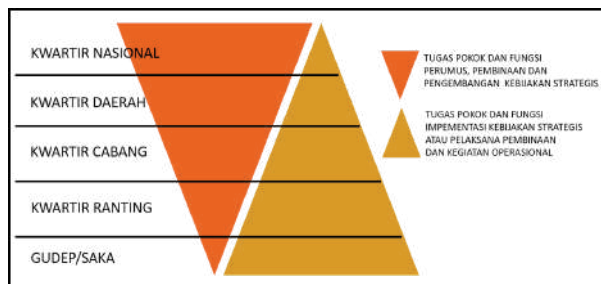
Tata kelola Gerakan Pramuka konsisten menerapkan sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran yang ditetapkan. Salah satu aspek sistim ini adalah pentingnya penyusunan rencana strategis di tiap level kwartir yang merupakan produk musyawarah kwartir. Musyawarah dimaksud tidak hanya fokus pada penggantian kepemimpinan tetapi menjadi forum mengembangkan ide baru, inovasi kebijakan dan program aksi menjawab tantangan jaman.

Rencana strategis adalah dokumen perencanaan Kwartir yang disusun untuk satu masa bakti, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai serta pilihan metode, strategi atau arahan pencapaian tujuan yang diinginkan. Rencana strategis, menjadi pedoman penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran tahunan.

Dengan adanya rencana strategis maka pencapaian tujuan Gerakan Pramuka pada tiap periode dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Program kerja disusun dan dilaksanakan dengan jelas tahapan dan fungsinya bagi proses pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi. Rencana strategis juga dapat menghindarkan pelaksanaan program kerja yang tidak fokus, improvisasi, serta tidak jelas arah dan tujuannya.

HIERARKI KWARTIR

Hierarki, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tata kelola organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Merujuk hal ini maka hierarki tata kelola Gerakan Pramuka terdiri dari tata kelola kelembagaan tingkat nasional, daerah, cabang, ranting hingga gugus depan. Hierarki atau pembagian tugas pokok dan fungsi kwartir Gerakan Pramuka dapat digambarkan dengan skema piramida dan piramida terbalik, seperti gambar berikut ini.



Hierarki Pembagian Tugas dan Fungsi Kwartir Gerakan Pramuka

Berdasar gambar di atas, sebagai contoh, tugas pokok dan fungsi Kwarnas lebih banyak sebagai perumus, pembinaan dan pengembangan kebijakan strategis daripada sebagai pelaksana kegiatan operasional, sebaliknya gudep dan saka lebih banyak sebagai pelaksana kebijakan dari sebagai perumus kebijakan, demikian seterusnya. Efektifitas tata kelola Gerakan Pramuka sangat bergantung kepada implementasi hierarki tugas pokok dan fungsi tiap jajarannya.***



Pelantikan Pengurus Kwarran Ambarawa, Masa Bakti 2022 – 2025
Kwarcab Kabupaten Semarang Kwarda Jawa Tengah.
Oleh Ka Kwarcab Kabupaten Semarang, Kak Sukaton Puratomo Priyatmo, SH,
www.pramukajateng.or.id

10. LAPORAN HASIL SURVEI

KAPASITAS KELEMBAGAAN KWARTIR RANTING SE JAWA DAN BALI TAHUN 2021

PENGANTAR

Kapasitas kelembagaan Kwartir Ranting adalah kemampuan dan potensi pengurus Kwartir Ranting dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi Gerakan Pramuka.

Kapasitas kelembagaan Kwartir Ranting meliputi faktor latar belakang SDM, tata kelola organisasi baik yang menyangkut struktur organisasi, sistem dan prosedur, keuangan, mekanisme kerja, pengaturan sarana prasarana serta kemampuan membangun kerjasama kemitraan dengan berbagai kalangan masyarakat.

Baseline Survey Kwartir Ranting tahun 2021, memetakan dan mengidentifikasi kapasitas dan potensi kelembagaan Kwarran secara selektif. Langkah ini dimaksudkan sebagai upaya memetakan data dan informasi untuk bahan masukan pengembangan kapasitas Kwarran di masa datang.

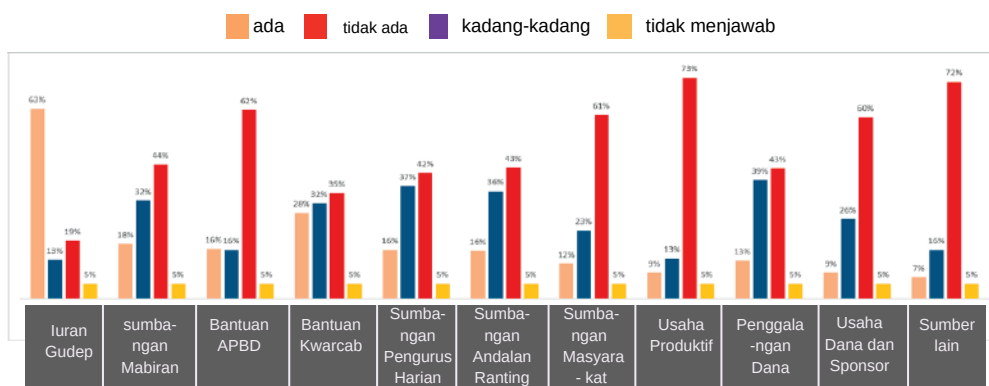
Langkah tersebut di atas didasari pertimbangan bahwa Kwartir Ranting yang mampu mengembangkan kapasitas dirinya secara optimal, akan berpengaruh secara signifikan terhadap upaya peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka di wilayah terdepan atau wilayah kecamatan.

SUMBER PENDANAAN KWARRAN

Survei ini menanyakan 11 sumber yang berpotensi menjadi sumber pendanaan Kwaran, seperti : iuran gudep, sumbangan Mabiran, bantuan APBD/APBN, sumbangan

pengurus harian, sumbangan andalan, sumbangan masyarakat, usaha produktif, usaha penggalangan dana, usaha sponsorship dan kemitraan dan usaha dari sumber lain-lain sesuai peraturan yang berlaku.

Dari data survei terlihat kemampuan Kwarran menggalang sumber pendanaan untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya bervariasi serta belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber dana yang bisa dimanfaatkan melalui kerjasama strategis. Data hasil survei tentang hal ini, tampak pada grafik di bawah ini,



Grafik 9:1
Sumber Pendanaan Kwartir Ranting
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

Dari grafik 9:1 dapat dilihat sumber pendanaan terbesar Kwarran berasal dari iuran gugusdepan, 63% responden menyatakan hal ini. Sumber pendanaan kedua berasal dari bantuan Kwardcab, yang diakui oleh 28% responden. Sumber pendanaan Kwarran yang lain

berasal dari internal, seperti sumbangan Mabiran, sumbangan Pengurus Harian serta sumbangan Andalan Ranting. Kwarran belum optimal didalam menggalang dukungan pendanaan dari pihak eksternal seperti dari unit usaha, bantuan masyarakat dan bantuan pemerintah.

Data hasil survei juga menunjukkan 62% responden menyatakan Kwarrannya tidak pernah menerima bantuan APBD maupun APBN. 16% responden menyatakan menerima bantuan APBN atau APBD dan 16% lainnya menyatakan kadang-kadang menerima bantuan APBN atau APBD.

Potensi sumber pendanaan lain bagi Kwaran, seperti sumbangan masyarakat, usaha produktif, penggalangan dana dan sponsorship, masih belum bisa dioptimalkan. 61% responden menyatakan tidak pernah mendapat bantuan dana dari masyarakat, 73% responden menyatakan Kwarrannya tidak memiliki usaha produktif, 43% responden menyatakan Kwarrannya tidak punya program penggalangan dana serta 60% responden menyatakan Kwarrannya tidak memiliki usaha sponsorship dan kemitraan.

KEPEMILIKAN SANGGAR ATAU SEKRETARIAT KWARRAN

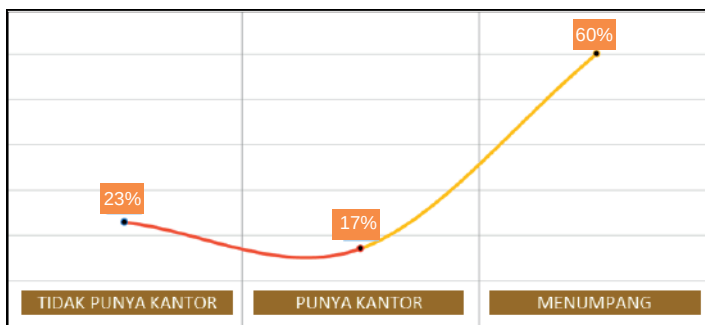
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kantor memiliki pengertian tempat untuk mengurus pekerjaan, atau tempat bekerja. Kantor merupakan pusat atau otak dari sebuah organisasi, karena didalamnya memuat fungsi klerikal seperti pengumpulan informasi, pencatatan, analisis data, distribusi informasi dan fungsi eksekutif seperti

perencanaan, perumusan kebijakan, pengorganisasian kerja, pengambilan keputusan dan lain sebagainya.

Kantor juga merupakan tempat berkumpulnya pengurus organisasi bekerja dan mengerjakan sesuatu untuk mencapai target dan tujuan organisasi. Kantor merupakan kebutuhan dasar dari sebuah organisasi karena merupakan fasilitas atau sarana prasarana penting yang mampu menjamin jalannya organisasi.

Kwartir Ranting sebagai salah satu unit organisasi penting dalam hierarki organisasi Gerakan Pramuka, wajib memiliki kantor atau sanggar untuk mendukung tata kelola dan operasional sehari-hari. Kantor Kwarran atau sanggar Kwarran merupakan syarat utama menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam survei ini dipetakan kepemilikan sanggar oleh tiap-tiap Kwarran yang menjadi responden survei. Pemetaan data dan informasi kepemilikan sanggar sangat penting sebagai bagian untuk menetapkan arah pengembangan kepengurusan Kwarran di masa depan. Kwarran harus memiliki standar minimal atau syarat minimal yang harus dipenuhi untuk dianggap layak dan mampu menjalankan peran, tugas pokok dan fungsi secara optimal.



Grafik 9:2
Kepemilikan Kantor/Sanggar Kwarran
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

Dari grafik 9:2 di atas ini, 23% responden menyatakan Kwarrannya tidak punya kantor, 17% responden menyatakan punya kantor sendiri dan 60% responden menyatakan kantor Kwarrannya menumpang di kantor atau gedung instansi pemerintah lainnya.

Dari 324 responden yang menyatakan kantor Kwarrannya menumpang, 89 % menyatakan menumpang di gedung instansi pemerintah, 11% lainnya menumpang di berbagai gedung organisasi, sebagaimana tercatat dalam data hasil survei di bawah ini.

NO	STATUS GEDUNG KWARAN	JUMLAH	%
1	MENUMPANG DI GEDUNG INSTANSI PEMERINTAH	306	89%
2	MENUMPANG DI GEDUNG KOPERASI	2	1%
3	MENUMPANG DI GEDUNG ORGANISASI LAIN	1	0%
4	MENUMPANG DI GEDUNG PGRI	10	3%
5	MENUMPANG DI RUMAH PENGURUS KWARAN	9	3%
6	MENUMPANG DI GEDUNG SEKOLAH	14	4%
7	JUMLAH	342	100%

Tabel 9:3
Status Kantor/Sanggar Kwarran
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

"Kurikulum (SKU dan SKK) Kepramukaan, perlu disesuaikan dengan keterampilan (life skill) yang dibutuhkan peserta didik dalam menghadapi perkembangan zaman, dan lebih (menekankan) kepada penanaman nilai-nilai karakter"

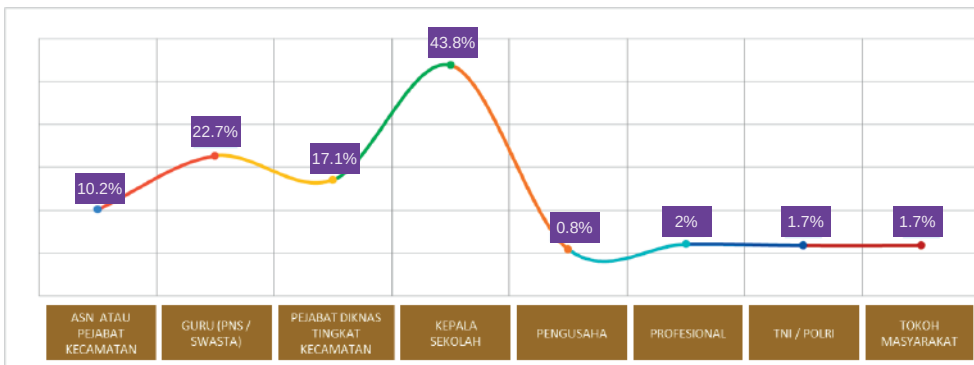
(Hj. Totoh Fatonah, Ketua Kwarran Cempaka,
Kwarcab Purwakarta, Jawa Barat)

LATAR BELAKANG SDM KETUA KWARRAN

Survei Kwarran se Jawa dan Bali tahun 2021 memetakan latar belakang Ketua Kwarran khususnya dari instansi atau unsur mana berasal. Data ini penting untuk mengkonfirmasi instansi dan kalangan masyarakat mana saja yang selama ini berperan mendukung keberadaan Kwarran. Data hasil survei tentang hal ini sbb :

yang jarang menjadi Ketua Kwarran. Kurang lebih berkisar antara 1.8% sd 2% responden yang menyatakan kalangan ini menjadi Ketua Kwarran.

Pilihan Ketua Kwarran yang berlatar pendidik sangat baik karena sejalan dengan misi Gerakan Pramuka sebagai gerakan pendidikan. Namun demikian ke depan perlu dikembangkan agar kalangan lain juga bersedia menjadi Ketua Kwarran.



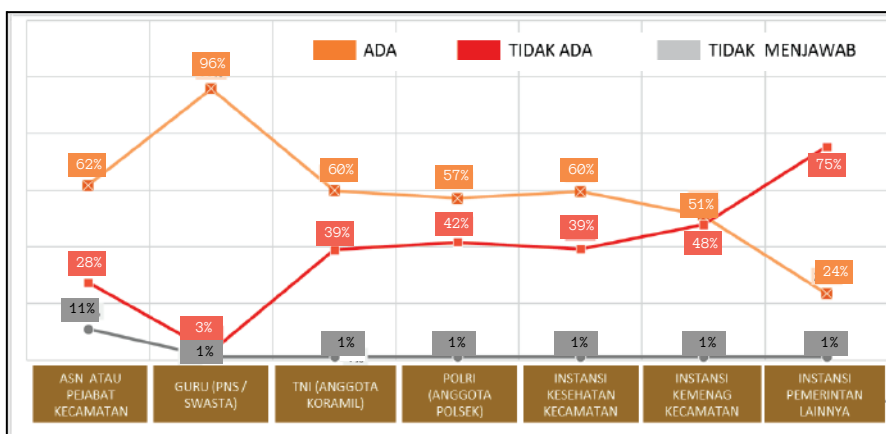
Grafik 9:4
Latar Belakang Ketua Kwarran
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

Dari grafik 9:4, 43% responden menyatakan latar belakang instansi Ketua Kwarran berasal dari Kepala Sekolah atau kalangan pendidik. Prosentase ini merupakan prosentase terbesar. Profesi atau jabatan dari instansi lain seperti ASN Kecamatan, Guru PNS atau Swasta dan Pejabat Diknas merupakan beberapa latar belakang jabatan yang cukup sering menjadi Ketua Kwarran.

Kalangan pengusaha, TNI, POLRI, dan tokoh masyarakat termasuk

LATAR BELAKANG PENGURUS KWARRAN

Pemetaan dan identifikasi latar belakang Pengurus Kwarran menjadi bagian dari identifikasi kapasitas kelembagaan Kwarran. Dalam posisi sebagai satuan organisasi Gerakan Pramuka, keberadaan Kwarran harus bisa ditopang atau menjadi tanggungjawab berbagai kelompok masyarakat, yang secara sekurela mengabdikan diri untuk ikut serta membina dan mengembangkan Gerakan Pramuka.



Grafik 9:5
Latar Belakang atau Asala Instansi Pengurus/Andalan Kwarann
Data Survei Kwarann se Jawa & Bali, tahun 2021

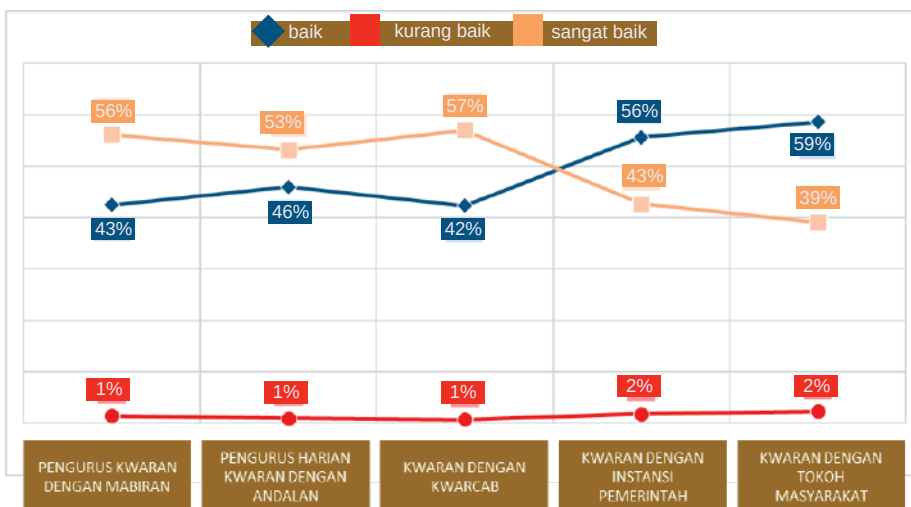
Berdasar data pada grafik 9:5 di atas, jika dilihat dari latar belakang instansi pemerintah, maka para pengurus Kwarann paling banyak berasal dari instansi pendidikan, kemudian ASN kecamatan, TNI, POLRI, ASN Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Dengan kata lain instansi yang memiliki kantor hingga tingkat kecamatan berpotensi untuk menjadi sumber rekrutmen kepengurusan Kwarann.

KOORDINASI KWARRAN DENGAN LEMBAGA LAIN

Partisipasi dan dukungan berbagai kelompok masyarakat serta soliditas tata kelola Kwarann didalam berkordinasi dengan lembaga lain, merupakan salah satu potensi kelembagaan yang harus terus dikembangkan.

Melalui koordinasi yang baik dan solid dengan berbagai pemangku kepentingan akan membantu Kwarann didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang semakin berat dan kompleks. Tugas membina dan mengembangkan Gerakan Pramuka di wilayah kecamatan, harus bisa dikembangkan dengan prinsip gotong royong.

Memperhatikan cukup luas dan kompleksnya tugas pokok dan fungsi Kwarann, maka partisipasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan merupakan sebuah keharusan. Dengan mengembangkan prinsip gotong royong, kesukarelaan dan tanggungjawab bersama, maka kordinasi Kwarann dengan berbagai lembaga lain dapat dikembangkan secara optimal. Data survei terkait hal ini sbb :



Grafik 9:6
Kinerja Kordinasi Kwarran secara Internal maupun Eksternal
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

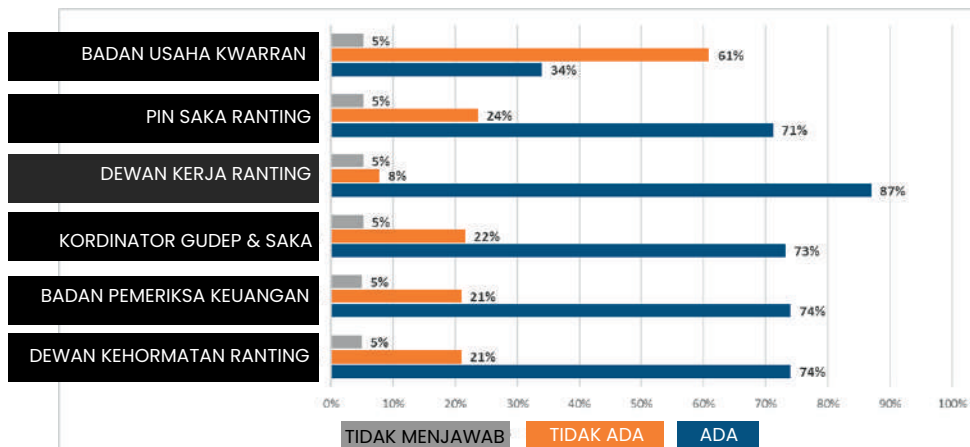
Dari data pada grafik 9:6, tampak bahwa kinerja kordinasi Kwarran secara internal seperti kordinasi dengan Mabiran, sesama pengurus Kwarran maupun dengan Kwarcab, berjalan sangat baik menurut 53% – 57% responden. Sedangkan menurut 42%–46% responden menyatakan kordinasi berjalan dengan baik. Responden yang menyatakan koordinasi internal kurang baik sangat sedikit antara 1 - 2%.

Pada sisi lain kinerja kordinasi Kwarran dengan pihak eksternal seperti koordinasi dengan instansi pemerintah maupun tokoh masyarakat, 56-59% responden menyatakan berjalan baik, sedangkan 39-43% responden menyatakan sangat baik. Dari data ini menunjukkan kinerja kordinasi Kwarran, telah berjalan optimal.

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI KWARRAN

Survei Kwarran se Jawa dan Bali, juga memetakan potensi kelembagaan atau alat kelengkapan organisasi Kwarran yang mampu didirikan dan dikembangkan oleh Pengurus Kwarran. Sesuai dengan aturan yang berlaku, tata kelola Kwarran harus dilengkapi dengan alat kelengkapan organisasi yang terdiri dari Badan Usaha, Pimpinan Saka Ranting, Dewan Kerja Ranting, Koordinator Gudep, Badan Pemeriksa Keuangan Ranting dan Dewan Kehormatan Ranting.

Data hasil survei tentang hal di atas sebagaimana tergambar dalam grafik pada halaman berikut ini.



Grafik 9:7
Kinerja Pembentukan Alat Kelengkapan Organisasi Kwarran
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

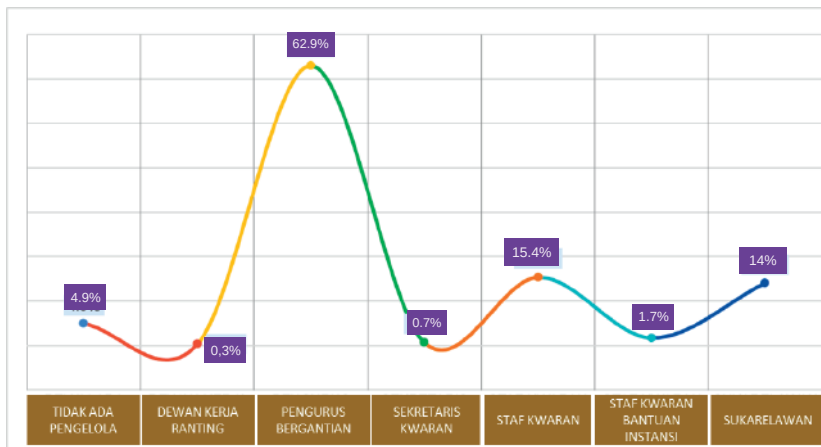
Dari data pada grafik 9:7, badan-badan kelengkapan Kwarran sebagian besar dapat dibentuk oleh para Pengurus Kwarran, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Badan kelengkapan yang telah didirikan perlu terus dikembangkan lebih lanjut, agar dapat berfungsi secara efektif.

Dari data pada grafik 9:7, 61% responden menyatakan Kwarrannya tidak punya unit usaha dan ini merupakan prosentasi terbesar. 35% responden menyatakan Kwarrannya punya unit usaha dan 5% responden tidak menjawab. Pendirian unit usaha sepertinya belum menjadi prioritas atau masih menghadapi kendala sehingga masih banyak Kwarran yang belum mampu mengembangkannya. Kedepan kemampuan Kwarran mendirikan unit usaha perlu terus didorong.

PENGELOLA SEKRETARIAT KWARRAN

Jika dilihat dari tugas pokok dan fungsinya, beban pekerjaan harian Kwarran cukup tinggi sehingga membutuhkan aktivitas perkantoran yang memadai. Keberadaan pengelola sekretariat yang aktif sehari-hari akan mampu memberikan dukungan administratif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kwarran.

Survei Kwarran se Jawa dan Bali tahun 2021 termasuk memetakan pengelolaan harian Kwarran. Data dan informasi ini penting untuk melihat sejauhmana aktivitas sekretariat Kwarran dan pengelolaannya. Data tentang pengelolaan Sekretariat Kwarran yang ditemukan dalam survei ini sbb :



Grafik 9:8
Aktivitas Harian Pengelola Sekretariat Kwarran
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

Dari data pada grafik 9:8 di atas, 62.9% respondeng menyatakan aktivitas harian Kwarran dikelola oleh pengurus secara bergantian. 15% dikelola oleh staf. Data ini sekaligus mengkonfirmasi hanya sekitar 15% Kwarran yang disurvei, yang memiliki staf Kwarran.

Data lain pada grafik ini juga menunjukkan 14% responden menyatakan Kwarran dikelola oleh para sukarelawan. 4.9% responden menyatakan Kwarran tidak ada yang mengelola, atau tidak aktif.

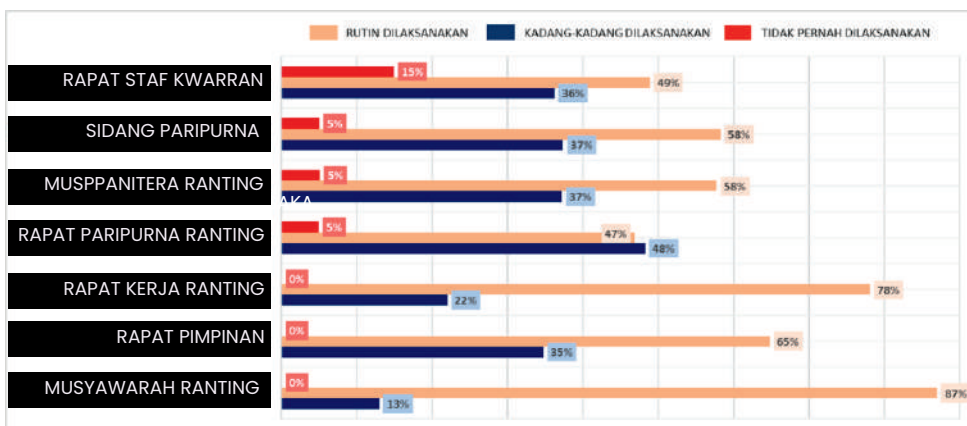
"Kwarran sebagai kwartir yang bersentuhan langsung dengan gugus depan, memiliki peran sangat strategis dalam menyukseskan pencapaian misi Gerakan Pramuka. Oleh karena itu harus dipikirkan solusi strategis dalam pembiayaan operasional kegiatannya"

(Amin Supriyadi, Andalan Ranting Cilandak, Kwarcab Kota Jakarta Selatan, Kwarda DKI Jakarta)

RAPAT & MUSYAWARAH KWARRAN

Penyelenggaraan rapat dan musyawarah secara konsisten dan efektif merupakan salah satu tolok ukur berjalannya mekanisme dan tata kelola organisasi. Berbagai jenis dan tata rapat serta musyawarah Kwarran telah diatur secara lengkap dalam petunjuk penyelenggaraan yang ditetapkan.

Survei Kwarran se Jawa dan Bali, memetakan bagaimana penyelenggaraan rapat dan musyawarah Kwarran. Data ini penting untuk memperoleh data dan informasi tentang mekanisme pembahasan berbagai masalah dan proses pengambilan keputusan di tingkat Kwarran. Data survei yang diperoleh tentang hal ini menunjukkan sbb :



Grafik 9:9
Pelaksanaan Rapat dan Musyawarah Kwarran
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

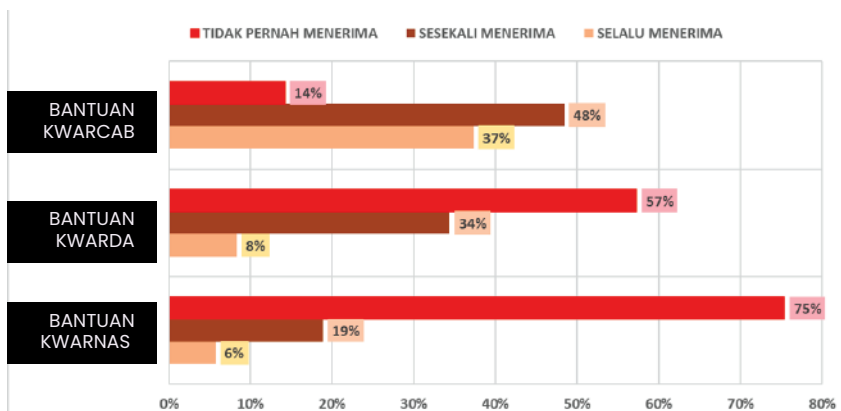
Dari data di grafik 9:9, 87% responden menyatakan musyawarah ranting rutin dilaksanakan. Data ini patut diapresiasi karena forum tertinggi dalam kepengurusan Kwarran telah dijalankan oleh sebagian besar Kwarran. Dengan ini menunjukkan forum evaluasi, penetapan perencanaan dan agenda strategis, rotasi kepemimpinan di tingkat Kwarran menurut sebagian besar responden survei telah terlaksana dengan baik dan rutin.

Dari seluruh penyelenggaraan rapat dan musyawarah ranting, yang rutinitas penyelenggaraannya di bawah 50% adalah rapat paripurna andalan ranting. Rapat ini sebenarnya sangat penting karena menjadi bagian dari siklus evaluasi dan perencanaan program tahunan yang harus dibahas dan dipahami oleh seluruh Andalan Kwartir Ranting.

Forum lain yang prosentasi penyelenggaraannya di bawah 50% adalah forum rapat staf. Kondisi ini tampaknya terkait erat dengan pengelolaan Sekretariat Kwarran yang banyak dikelola oleh para pengurus atau sedikit sekali yang dikelola oleh staf secara mandiri

BANTUAN SARANA PRSARANA

Dalam hierarki kwartir Gerakan Pramuka, Kwartir Ranting sebagai kwartir terdepan tidak saja memperoleh pembinaan dan pengembangan dalam tata kelola maupun program kegiatan tetapi juga bantuan sarana dan prasarana dari kwartir di atasnya. Data survei menemukan bantuan sarana prasarana yang diterima oleh Kwarran dari kwartir di atasnya, baik Kwarcab, Kwarda maupun Kwarnas, sbb :



Grafik 9:10
Sumber Bantuan Sarana Prasarana Kwarran
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

Dari data pada grafik 9:10, sumber bantuan sarana prasarana Kwarran paling banyak diterima dari Kwarcab. Dalam hal ini 37% responden menyatakan selalu menerima, 48% sesekali menerima, hanya 14% yang menyatakan tidak pernah menerima bantuan Kwarcab. Hal ini berbeda dengan bantuan dari Kwarda dan Kwarnas.

Dalam hal bantuan Kwarda 57% responden menyatakan tidak pernah menerima, 34% responden menyatakan sesekali menerima dan hanya 8% yang menyatakan selalu menerima. Sedangkan bantuan dari Kwarnas 75% responden menyatakan tidak pernah menerima, 19% sesekali menerima dan hanya 6% yang menyatakan selalu menerima.

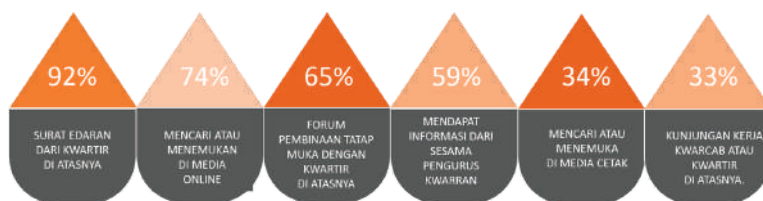
AKSES INFORMASI

Cara Kwarran mengakses atau mendapat informasi tentang kebijakan pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka, penyelenggaraan program kerja, kordinasi organisasi dan berbagai informasi lain merupakan hal yang sangat penting. Alur informasi yang tepat dan cepat akan membantu akselerasi perkembangan organisasi didalam merespon berbagai tantangan yang terjadi.

Data survei menemukan beragam akses Kwarran dalam menerima dan mencari informasi. Data selengkapnya tentang akses informasi sebagaimana dapat dilihat pada grafik di halaman berikut ini.

"Peran aktif Kwarcab, Kwarda dan Kwarnas (sesuai hierarki tugas pokok dan fungsinya) dalam monitoring, membina dan membimbing Kwarran dengan cara terjun langsung, sangat diperlukan"

(Yudi Heriana Tantri, Andalan Ranting Sedayu, Kwarcab Bantul, Kwarda DI Yogyakarta)



Grafik 9:11
Akses Informasi Oleh Kwarran
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

Dari data di grafik 9:11, akses Pengurus Kwarran dalam memperoleh informasi yang terkait dengan organisasi, 92% responden menyatakan memperoleh informasi dari surat edaran kwartir di atasnya. Akses informasi terbesar kedua menurut 74% responden mencari dan mendapatkan dari media online.

Forum pembinaan tatap muka dengan Kwartir di atasnya masih efektif sebagai akses informasi, 65% responden menyatakan memperoleh informasi dari forum ini. Sebaliknya

media cetak dan forum-forum kunjungan (yang formal) tidak lagi efektif menjadi akses informasi, hanya 1/3 responden yang menyatakan memperoleh informasi dari media cetak dan kunjungan kerja kwartir di atasnya.

Temuan data ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan untuk mengembangkan komunikasi organisasi khususnya antara Kwarran dengan kwartir di atasnya. Komunikasi dan informasi organisasi yang efektif akan mengefektifkan pula pencapaian visi dan misi organisasi.

"Pengaturan atau regulasi pelibatan Dunia Usaha, BUMN dan BUMD, dalam bekerjasama dan bermitra dengan Kwarran belum diatur"

(Endang Setiawan, Andalan Ranting Majasari, Kwarcab Pandeglang, Kwarda Banten)

"Pencapaian SKU, SKK Pramuka Garuda jenjang Penggalang di SD, sangat terbatas dengan lama waktu di sekolah yang hanya 2 atau 3 tahun (perlu ada mekanisme pengaturan pembinaan jenjang Penggalang saat di SD dan SMP untuk menjaga kesinambungan Pembinaan)"

(Drs. Musaheri, M.Psu, Ketua Kwarran Kalianget, Kwarcab Sumenep, Kwarda Jawa Timur)



Pelantikan Pengurus Kwarran Gerokgak, Masa Bakti 2022 – 2025
Kwarcab Buleleng, Kwarda Bali
Oleh Ka Ketua Harian Kwarcab Kabupaten Buleleng, Kak Made Tingkat,
<https://pramukabuleleng.or.id>

11. LAPORAN HASIL SURVEI

IMPLEMENTASI PERAN KWARTIR RANTING SE JAWA DAN BALI TAHUN 2021

PENGANTAR

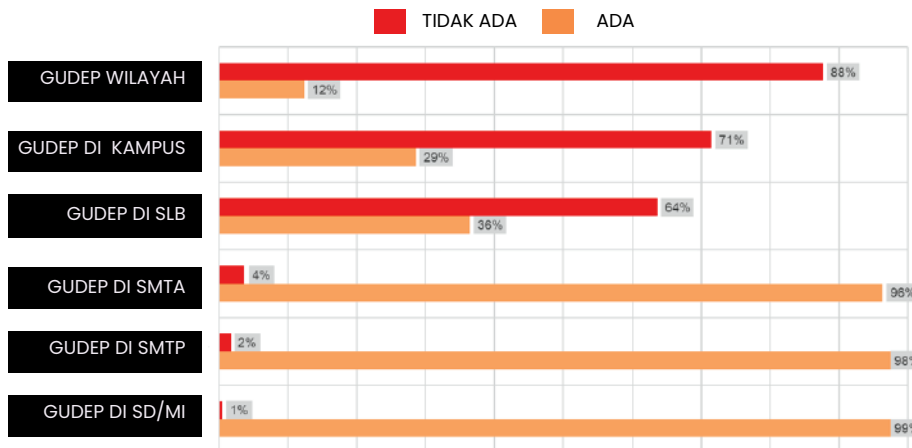
Implementasi peran, terkait dengan kinerja Kwarran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Mengacu pada Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 224 tahun 2007, tentang Petunjuk Penyelenggaraan organisasi dan tata kerja Kwartir Ranting

Gerakan Pramuka, secara garis besar tugas pokok dan fungsi Kwartir Ranting adalah membina gugus depan dan satuan karya di wilayahnya, menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan masyarakat maupun instansi pemerintah, serta membina dan mengembangkan Gerakan Pramuka di wilayahnya.

Adapun tugas pokok dan fungsi Kwarran secara internal adalah menjadi penanggungjawab penyelenggaraan manajemen kegiatan, baik operasional maupun administratif di tingkat kwarran. Termasuk didalamnya mengelola personil, logistik, keuangan, usaha dana, sarana prasarana dan aset.

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GUGUS DEPAN

Survei Kwarran se Bali dan Jawa tahun 2021 juga mengumpulkan dan mengidentifikasi jenis-jenis pangkalan gugusdepan yang berada di wilayah pembinaan para responden. Hal ini mengingat karakter wilayah kecamatan yang berbeda satu sama lain. Data survei tentang hal ini sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

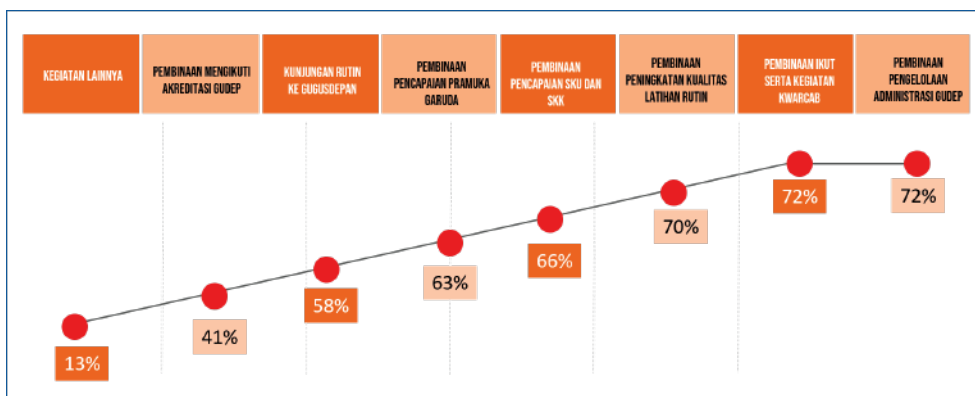


Grafik 10:1
Perkembangan Pangkalan Gudep di Kwarran
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

Berdasar Grafik 10:1 di atas, sebagian besar gudep yang ada di Kwarran yang menjadi responden survei ini adalah gudep yang berpangkalan di sekolah, baik SD, SMP atau SMA sederajat. Gudep yang berpangkalan di kampus perguruan tinggi, sekolah luar biasa dan gudep teritorial setiap Kwarran memiliki namun dalam prosentase yang lebih sedikit. Gugus depan Wilayah atau gudep teritorial sebagai cikal bakal Gudep Gerakan Pramuka, ternyata tidak bisa berkembang, hanya 12% responden yang menyatakan di Kwarranya ada atau memiliki gudep wilayah.

PROGRAM PEMBINAAN GUGUS DEPAN

Identifikasi dan pengumpula data tentang pelaksanaan program pembinaan terhadap gugusdepan yang dilaksanakan oleh Kwarran dalam survei ini, dimaksudkan untuk mengetahui jenis program pembinaan yang telah dilaksanakan. Hal ini karena tugas dan fungsi pembinaan memiliki cakupan yang luas, sehingga harus menetapkan prioritas dan mempertimbangkan situasi dan kondisi.



Grafik 10:2
Pendapat Responden tentang Implementasi Program Pembinaan Gudep
oleh Pengurus Kwartir Ranting
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

Dari data pada grafik 10:2, 72% responden menyatakan program pembinaan gudep, lebih banyak pada pembinaan pengelolaan administrasi gudep dan persiapam ikut kegiatan di Kwarcab. 70% responden menyatakan pembinaan peningkatan kualitas latihan rutin di gudep merupakan program yang juga secara rutin dilaksanakan oleh Pengurus Kwarran.

Program yang terkait dengan pembinaan kualitas pendidikan kepramukaan seperti pencapaian SKU/ SKK dan pencapaian Pramuka Garuda juga rutin dilaksanakan, namun dengan prosentase yang lebih rendah, yaitu oleh 63-66% responden. Data ini menunjukkan bahwa pembinaan tata kelola dan pembinaan pendidikan dan latihan relatif sudah berimbang dilaksanakan oleh para pengurus Kwarran.

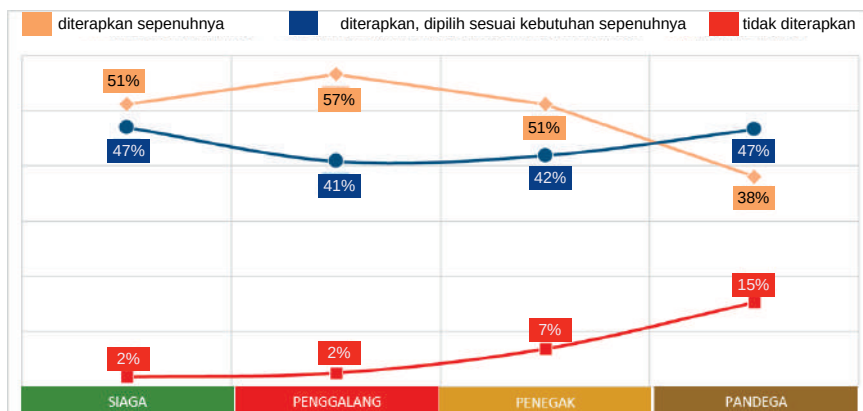
Program pembinaan yang perlu ditingkatkan adalah mendorong

Mabigus dan Pembina Gudep untuk mengikutsertakan gudep di wilayahnya dalam program akreditasi gudep. Akreditasi penting sebagai bagian dari proses penjaminan mutu dan membangun akuntabilitas publik.

PEMBINAAN PENERAPAN SKU DAN SKK DALAM LATIHAN DI GUDEP

Kwartir Ranting disamping melakukan pembinaan gudep secara organisatoris juga melakukan pembinaan gudep sebagai satuan pendidikan. Salah satu program pembinaan dalam hal ini adalah penerapan dan pencapaian syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus dalam proses pembinaan peserta didik.

Data hasil survei tentang program pembinaan penerapan syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.



Grafik 10:3
Penerapan SKU dan SKK di Gugusdepan
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

Berdasar Grafik 10:3 di atas, penerapan syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus di gugusdepan, hampir berimbang antara yang menyatakan diterapkan sepenuhnya dengan yang menyatakan diterapkan tetapi dipilih sesuai kebutuhan. Data ini juga menunjukkan hanya sedikit gugus depan yang tidak menerapkan syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus sebagai materi latihan di gugusdepan.

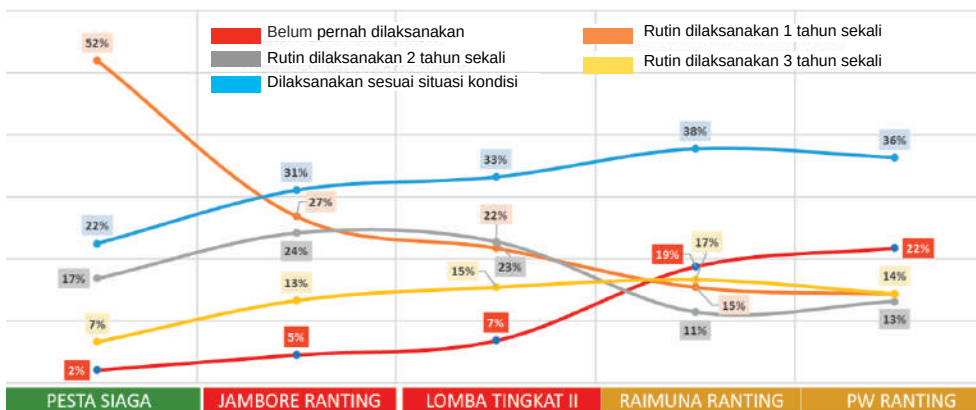
Berdasarkan data pada 10:3 terdapat perbedaan pada jenjang Pandega, yaitu prosentase yang menerapkan sepenuhnya syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus sebesar 38%, dibawah yang menerapkan secara selektif disesuaikan dengan kondisi sebesar 47%. Bahkan prosentase yang tidak menerapkan syarat kecakapan cukup besar yaitu sekitar 15% atau paling besar dibandingkan jenjang peserta didik yang lain.

PROGRAM KEGIATAN PESERTA DIDIK DI TINGKAT KWARRAN

Kegiatan di tingkat Kwarran Ranting untuk peserta didik merupakan salah satu instrumen pembinaan yang penting. Kegiatan di Kwarran disamping sebagai arena untuk mengembangkan materi kegiatan juga menjadi salah satu tolok ukur capaian pembinaan di gugus depan.

Survei ini juga mengumpulkan data dan informasi tentang penyelenggaraan kegiatan pokok yang harus diselenggarakan oleh Kwarran. Kegiatan tersebut diantaranya Pesta Siaga untuk jenjang Siaga, Jambore Ranting dan LT II untuk jenjang Pengkalang, Raimuna Ranting dan Perkemahan Wirakarya Ranting untuk jenjang Penegak Pandega.

Data hasil survei tentang hal ini tercantum pada halaman berikut.



Grafik 10:4
Implementasi Kegiatan Peserta Didik di Tingkat Kwartir Ranting
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

Dari data pada grafik 10:4, Pesta Siaga merupakan kegiatan yang sering dilaksanakan oleh Kwartir Ranting. 52% responden menyatakan Pesta Siaga dilaksanakan 1 tahun sekali, 22% responden menyatakan melaksanakan sesuai situasi dan kondisi, 17% responden menyatakan melaksanakan 2 tahun sekali, 7% responden menyatakan melaksanakan 3 tahun sekali, dan hanya 2% responden yang menyatakan tidak pernah melakukan Pesta Siaga.

Jambore Pramuka Penggalang, 31% responden menyatakan melaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi. 27% responden menyatakan melaksanakan 1 tahun sekali, 24% responden menyatakan melaksanakan 2 tahun sekali, 13% responden menyatakan melaksanakan 3 tahun sekali. Sedangkan yang tidak melaksanakan Jambore Ranting sekitar 5% responden.

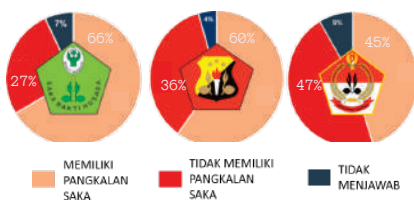
Kegiatan Lomba Tingkat II Pramuka Penggalang, 33% responden menyatakan melaksanakan sesuai situasi dan kondisi. 22% dan 23% responden menyatakan melaksanakan 1 dan 2 tahun sekali. 15% responden menyatakan melaksanakan 3 tahun sekali, serta 7% responden menyatakan tidak pernah melakukannya.

Pada kegiatan Pramuka Penegak Pandega baik Raimuna maupun Perkemahan Wirakarya, prosentase responden yang menyatakan tidak pernah melaksanakan cukup tinggi antara 19% - 22%. Sedangkan yang menyatakan melaksanakan sesuai situasi dan kondisi sebesar 36% - 38%. Yang rutin melaksanakan baik dalam durasi 1, 2 atau 3 tahunan sekitar 11% - 17% responden. Data ini menunjukkan kegiatan Penegak Pandega tidak serutin dan seaktif kegiatan Siaga dan Penggalang di tingkat Kwartir Ranting.

PEMBINAAN SATUAN KARYA PRAMUKA GERAKAN PRAMUKA

Pembinaan Satuan Karya Pramuka merupakan salah satu tugas penting Kwartir Ranting. Tugas ini biasanya dilaksanakan bersama Kwartir Cabang. Satuan Karya Pramuka merupakan wadah pembinaan keterampilan fungsional berbasis *job creation*, vokasional dan kesuka-relawanan. Saka memegang peran strategis dalam proses pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega untuk kemandirian hidupnya di masa depan.

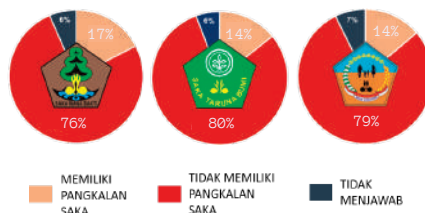
Kwartir Nasional bekerjasama dengan kementerian dan lembaga negara, saat ini memiliki 11 Satuan Karya Pramuka. Berdasar data temuan survei belum semua Saka berkembang secara optimal di Kwartir Ranting. Hanya 3 Saka yang mampu berkembang dengan baik, dalam arti memiliki pangkalan di atas 45% Kwarran dari 246 Kwarran yang disurvei. Ketiga Saka dimaksud adalah Saka Bakti Husada, Saka Bhayangkara dan Saka Wirakartika, seperti data di bawah ini.



Grafik 10:5
Tiga Satuan Karya Yang Paling Berkembang di Kwarran
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

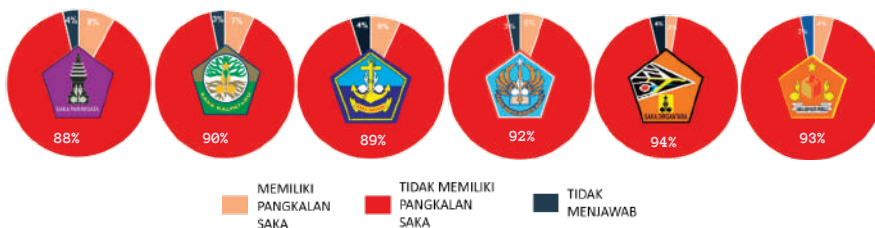
Dari data di grafik 10:5, tampak dari 246 Kwarran yang menjadi responden survei, 66% setara dengan 164 responden menyatakan Kwarrannya memiliki Pangkalan Saka Bakti Husada. 60% setara dengan 148 responden menyatakan Kwarrannya memiliki Pangkalan Saka Bhayangkara. 45% setara dengan 111 responden menyatakan Kwarrannya memiliki Pangkalan Saka Wirakartika.

Data survei menemukan 3 Saka yang berkembang antara 14% - 17% dari seluruh responden survei. Ketiga Saka tersebut Saka Wanabakti, Saka Taruna Bumi dan Saka Kencana. Data selengkapnya sbb :



Grafik 10:6
Tiga Satuan Karya Yang Cukup Berkembang di Kwarran
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

Dari data di grafik 10:6, dari 246 Kwarran yang menjadi responden survei, 17% setara dengan 43 responden menyatakannya Kwarrannya memiliki Pangkalan Saka Wanabakti. 14% setara dengan 34 responden menyatakan Kwarrannya memiliki Pangkalan Saka Taruna Bumi dan 7% atau setara dengan 17 responden menyatakan Kwarrannya memiliki Pangkalan Saka Kencana.



Grafik 10:6
Tiga Satuan Karya Yang Kurang Berkembang di Kwarran
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

Data pada grafik 10:7, menunjukkan beberapa Satuan Karya Pramuka yang perkembangannya belum optimal. Dari 246 Kwarran yang disurvei, para responden menyatakan Saka Bahari memiliki 15 Pangkalan atau 6%, Saka Widya Budaya Bakti memiliki 13 Pangkalan atau 5%, Saka Dirgantara memiliki 6 Pangkalan atau 2 % dan Saka Rintisan Adhyasta memiliki 11 Pangkalan atau 4%.

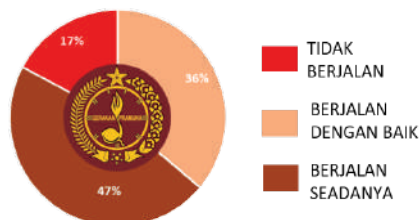
Data di atas mengkonfirmasi Saka yang berkembang optimal, Saka yang instansi atau lembaga pengam-punya memiliki kantor hingga tingkat kecamatan, seperti Puskesmas sebagai Pangkalan Saka Bakti Husada, Polsek sebagai Pangkalan Saka Bhayangkara dan Koramil sebagai Pangkalan Saka Wirakartika.

PEMBINAAN CAPAIAN PRAMUKA GARUDA

Pelaksanaan tugas Kwarran dalam pembinaan dan Pengembangan Pra-muka Garuda, 36% responden me-nyatakan berjalan dengan baik, 47% responden menyatakan berjalan.

dan 17% menyatakan pembinaan pencapaian Pramuka Garuda tidak berjalan. Data ini mengkonfirmasi separo lebih responden menyatakan bahwa pembinaan pencapaian Pra-muka Garuda oleh Pengurus Kwarran masih belum optimal.

Data selengkapnya sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini :



Grafik 10:8
Pembinaan Capaian Pramuka Garuda
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali,
tahun 2021

PEMBINAAN AKREDITASI GUGUSDEPAN

Akreditasi Gugusdepan dilaksanakan atas dasar Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 203 Tahun 2011 Tentang Pedoman Akre-ditasi Gudep Pramuka. Melalui keputusan ini diharapkan proses evaluasi dan penilaian gugusdepan

dapat dilaksanakan secara komprehensif. Akreditasi gudep juga merupakan komitmen Gerakan Pramuka terhadap penjaminan mutu dan kualitas penyelenggaraan program pendidikan kepramukaan, agar dapat dilaksanakan secara layak dan dapat dipertanggungjawabkan.

Survei Kwarran se Jawa dan Bali tahun 2021 juga memetakan peran Pengurus Kwarran dalam membina dan mengembangkan kebijakan akreditasi Gudep. Data yang diperoleh sbb :



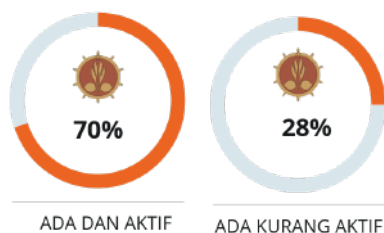
Grafik 10:9
Peran Kwarran dalam Program Akreditasi Gudep
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

Dari data di grafik 10:9, sebagian besar atau 71% responden menyatakan Kwarrannya telah mengetahui program akreditasi Gudep namun belum bisa melaksanakan. 18% responden menyatakan Kwarrannya telah melaksanakan akreditasi gudep. Sekitar 11% responden menyatakan Kwarrannya belum mengetahui program akreditasi gudep. Data ini mengkonfirmasi bahwa Akreditasi Gudep sudah diketahui oleh sebagian besar Pengurus Kwarran, namun realisasinya belum optimal.

PEMBINAAN DEWAN KERJA RANTING

DKR atau Dewan Kerja Ranting merupakan wadah pembinaan Pramuka Penegak Pandega untuk mengembangkan kepemimpinan dan melatih kemampuannya ikut serta mengelola Kwartir Ranting. DKR merupakan ujian pembinaan Pramuka Penegak Pandega "dari, oleh dan untuk Pramuka Penegak Pandega" di bawah bimbingan orang dewasa.

Membina dan mengembangkan Dewan Kerja Ranting merupakan tugas Pengurus Kwartir Ranting. Keberhasilan pembinaan DKR akan berdampak positif bagi pembinaan Pramuka Penegak Pandega. Data hasil survei menunjukkan pembinaan DKR oleh Kwarran dengan data sbb :

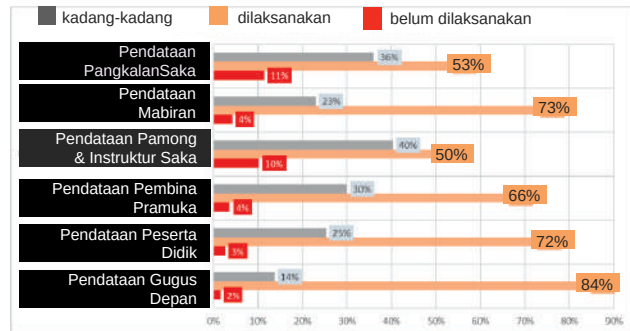


Grafik 10:10
Peran Kwarran dalam Pembinaan DKR
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

Dari data di grafik 11:9, 70% responden menyatakan DKR di Kwarrannya ada dan aktif, 28% responden menyatakan ada dan kurang aktif. 2% lainnya tidak punya DKR karena di Kwarrannya tidak ada Ambalan dan Racana.

PELAKSANAAN PENDATAAN KWARRAN GERAKAN PRAMUKA

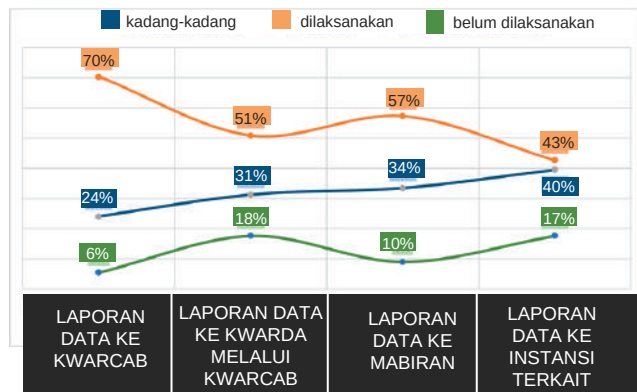
Tugas mengelola Kwartir Ranting salah satunya adalah melakukan pendataan potensi secara rutin dan bisa dipertanggungjawabkan akurasinya. Dari data survei seperti pada grafik di samping ini, mayoritas Kwarran telah melakukan pendataan.



Grafik 10:11
Pelaksanaan Pendataan oleh Kwarran
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali,
tahun 2021

Namun demikian masih terdapat beberapa Kwarran yang menurut para responden belum melaksanakan pendataan, meskipun persentasenya kecil yaitu antara 2% sampai 11%.

Peran pelaporan hasil pendataan oleh Kwarran kepada Kwarcab, Kwarda dan Mabiran telah berjalan dengan baik. Namun demikian pelaporan data kepada instansi dan masyarakat luas, masih perlu ditingkatkan konsistensinya. Sebagaimana terlihat pada data disamping ini.



Grafik 10:12
Pelaporan Pendataan oleh Kwarran
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

Pelaporan data sangat penting karena dapat menumbuhkan kepercayaan dan dukungan para pihak kepada Gerakan Pramuka. Kemampuan Kwarran melaporkan dan mengkomunikasikan data perlu terus ditingkatkan.

"Perbaikan pedoman regulasi Kwarran, hendaknya dilengkapi dengan mekanisme rapat dan musyawarah secara lengkap, termasuk pedoman penyusunan materi (renstra, rencana kerja, program kerja, anggaran, dll) dan pengambilan keputusannya"

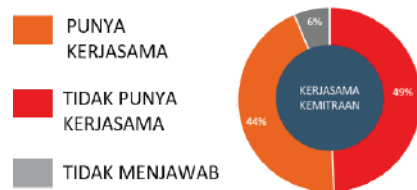
(I Nyoman Suartawan, Sekretaris Kwarran Gerokgak, Kwarcab Buleleng, Kwarda Bali)

KEMAMPUAN KWARRAN MELAKSANAKAN KERJASAMA KEMITRAAN

Kemampuan menjalin kerjasama kemitraan merupakan salah tolak ukur kualitas tata kelola Kwartir Ranting. Hal itu karena penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagai gerakan pendidikan berbasis masyarakat, dituntut mampu melibatkan berbagai komponen yang ada di tengah masyarakat.

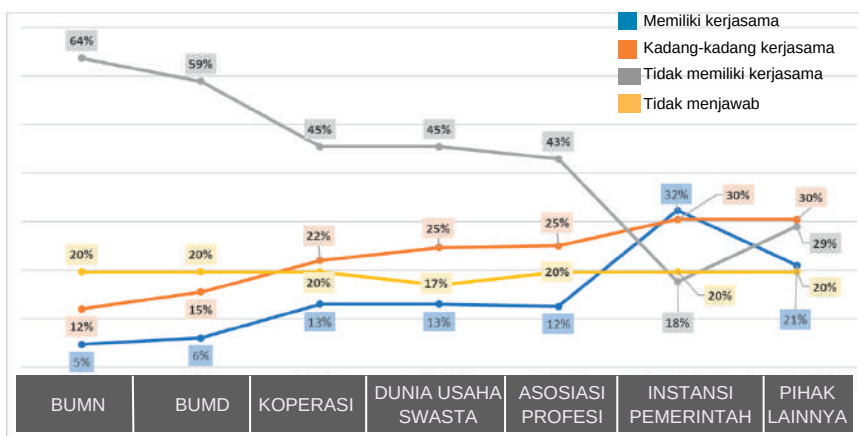
Pada sisi lain kerjasama kemitraan dengan berbagai kalangan dapat menopang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kwartir Ranting. Melalui kerjasama kemitraan diharapkan partisipasi dan dukungan masyarakat terus meningkat disamping dapat pula meningkatkan rasa memiliki terhadap Gerakan Pramuka.

Hasil survei tentang kemampuan Kwarran dalam menjalin kerjasama kemitraan dapat dilihat pada grafik 10:13 di bawah ini.



Grafik 10:13
Kerjasama Kemitraan Kwarran
se Jawa & Bali, tahun 2021

Dari data di grafik 10:13, 44% responden menyatakan Kwarrannya memiliki kerjasama, 49% menyatakan tidak memiliki kerjasama, 6% responden tidak menjawab. Data ini mengkonfirmasi kemampuan Kwarran didalam menjalin kerjasama kemitraan belum merata. Survei ini juga memetakan lembaga yang bekerjasama dan bermitra dengan Kwarran, sebagaimana data dalam grafik 10:14 di bawah ini.



Grafik 10:14
Lembaga Mitra dan Kerjasama Kwarran
Data Survei se Jawa & Bali, tahun 2021

Dari data 10:14 di atas terdapat beberapa lembaga yang berpotensi dan telah bermitra dengan Kwarran meskipun prosentasenya masih belum optimal. Kerjasama yang telah dijalin Kwarran paling besar hanya dilakukan oleh 32% responden yaitu kerjasama dengan dinas atau instansi pemerintah. Kerjasama dengan instansi pemerintah merupakan kerjasama paling banyak dilakukan.

43% sampai dengan 64 % responden menyatakan Kwarrannya tidak memiliki kerjasama kemitraan dengan BUMN, BUMD, Koperasi, Dunia Usaha (swasta) maupun kalangan profesional. Selanjutnya 20% - 30% responden menyatakan

Kwarrannya memiliki kerjasama kemitraan yang bersifat insidental atau kadang-kadang. Jumlah responden yang tidak menjawab atas pertanyaan ini masih cukup besar berada dalam kisaran 20%.

Pada sisi lain jika disisir lebih lanjut berbasis Kwartir Daerah, maka terdapat tingkat perbedaan Kwarran didalam menjalin kerjasama kemitraan. Perbedaan ini tentu diakibatkan oleh banyak faktor. Temuan survei menjelaskan Kwarran di Kwarda Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten relatif lebih aktif menjalin kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

NO	KWARDA	JUMLAH RESPONDEN	MEMILIKI KERJASAMA	TIDAK MEMILIKI KERJASAMA	TIDAK MENJAWAB
1	BANTEN	139	54%	42%	4%
2	DKI JAKARTA	15	27%	67%	7%
3	JAWA BARAT	58	50%	29%	21%
4	JAWA TENGAH	84	65%	30%	5%
5	DI YOGYAKARTA	30	43%	50%	7%
6	JAWA TIMUR	222	46%	50%	4%
7	BALI	53	34%	57%	9%
		601	49%	44%	6%

Grafik 10:15
Kerjasama Kemitraan Kwarran di Tiap Kwarda
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

"Perbaikan regulasi dan pedoman tata kelola Kwarran, hendaknya lebih memperhatikan Kwarran yg kekurangan sumber daya manusia yang umumnya terletak di daerah terpencil. Artinya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi ranting (karena situasi dan kondisinya antara satu Kwarran dengan Kwarran lain tidak merata).

(Mulyana, M.Pd, MT, Bendahara Kwarran Leuwidamar, KwarcabLebak, Kwarda Banten)



Pelantikan Pengurus Kwarran Ngaliyan, Masa Bakti 2021 - 2024
Kwarcab Kota Semarang, Kwarda Jawa Tengah.
Oleh Ka Kwarcab Kota Semarang, Kak Adi Tri Hananto
<https://kotasemarang.pramukajateng.or.id>

12. LAPORAN HASIL SURVEI

ARAH PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGURUS KWARTIR RANTING SE JAWA DAN BALI TAHUN 2021

Survei Kwaran se Jawa dan Bali disamping memetakan permasalahan, hambatan dan tantangan, juga mengumpulkan rekomendasi pemecahan masalah menurut aspirasi para responden. Aspirasi ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengembangan kapasitas Kwarran baik dari segi SDM, kerjasama kemitraan, penyelenggaraan program, dan berbagai aspek lainnya.

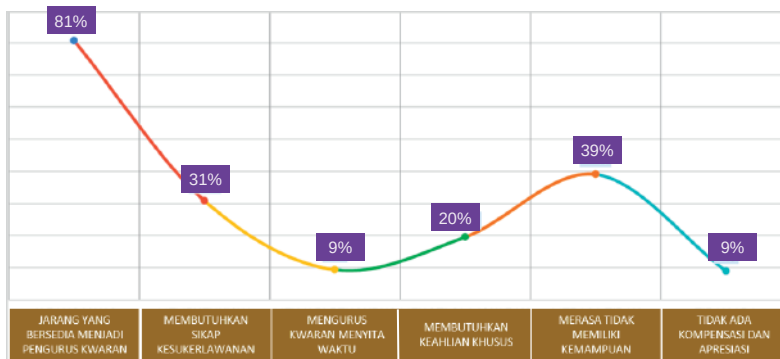
PENGANTAR

Arah pengembangan kapasitas (*capacity building*) didasarkan pada permasalahan, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Pengurus Kwarran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Arah pengembangan kapasitas dapat berupa penyempurnaan regulasi, peningkatan kualifikasi SDM, perluasan jejaring, dsb. Disamping itu juga dapat memberi arah kepada jajaran Kwartir Cabang, Kwartir Daerah dan Kwartir Nasional dalam memberi dukungan terhadap Kwartir Ranting.

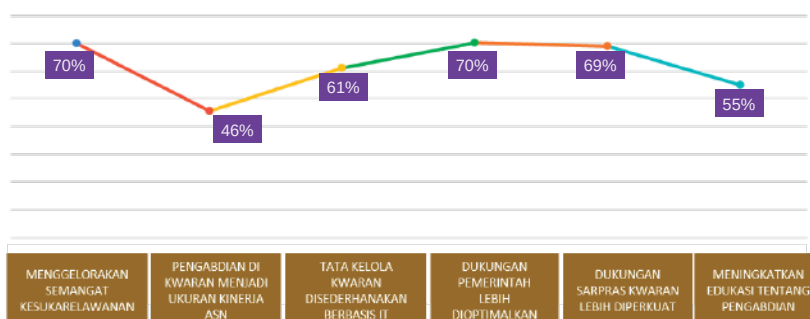
ARAH PENGEMBANGAN SDM PENGURUS KWARRAN

Survei ini memberikan pertanyaan tertutup kepada para responden tentang hambatan pembentukan kepengurusan Kwarrir Ranting. Menurut para responden, hambatan terbesar didalam membentuk kepengurusan Kwarran adalah jarang yang bersedia menjadi pengurus Kwarran (81%). Faktor kedua merasa tidak memiliki kemampuan menjadi pengurus Kwaran (39%). Faktor ketiga menjadi Pengurus Kwarran membutuhkan sikap kesukarelawanan (31%). Terdapat faktor-faktor lain sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.



Grafik 11:1
Hambatan Kepengurusan Kwarran
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

Kepada responden disampaikan langkah-langkah mengatasi hambatan pembentukan pengurus Kwarran. Dua langkah penting yang menjadi pilihan utama para responden adalah “menggelorakan semangat kesukarelawanan” dan “meningkatkan dukungan pemerintah”. Data selengkapnya sbb :

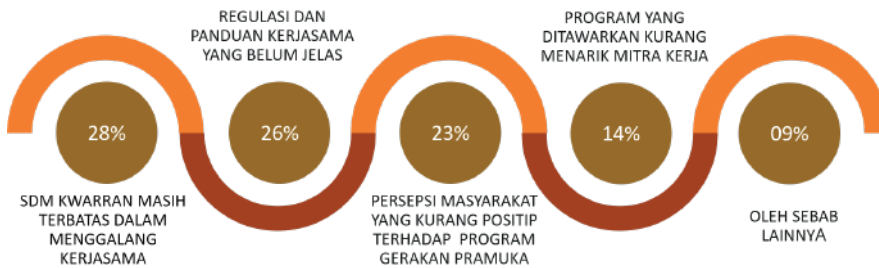


Grafik 11:2
Agenda Mengtasi Hambatan Pembentukan Kepengurusan Kwarran
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

Dari data di atas, arah pengembangan kepengurusan Kwarran adalah memperluas kesediaan berbagai kalangan masyarakat untuk ikut mengelola Gerakan Pramuka. Untuk mendukung arah pengembangan hal ini maka penguatan regulasi, edukasi dan sosialisasi kepada berbagai pemangku kepentingan untuk ikut serta membina dan mengembangkan Gerakan Pramuka di tingkat Kwartir perlu terus ditingkatkan.

ARAH PENGEMBANGAN KAPASITAS KERJASAMA KEMITRAAN KWARRAN

Kemampuan menjalin kerjasama kemitraan merupakan salah satu peran Kwarran yang belum optimal. Pada sisi lain kerjasama dan kemitraan merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kwarran. Survei ini memberikan pertanyaan tertutup tentang faktor penghambat Kwarran dalam melaksanakan kerjasama kemitraan, data yang diperoleh sbb :



Grafik 11:3
Hambatan Kerjasama Kemitraan Kwarran
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

Dari data di atas, reponden hampir terbagi rata dalam menanggapi faktor penyebab atau hambatan yang dihadapi Kwarran untuk menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak lain. Secara umum dapat disimpulkan ada 3 hambatan besar yang dihadapi Kwarran seperti kemampuan SDM, regulasi dan persepsi masyarakat.

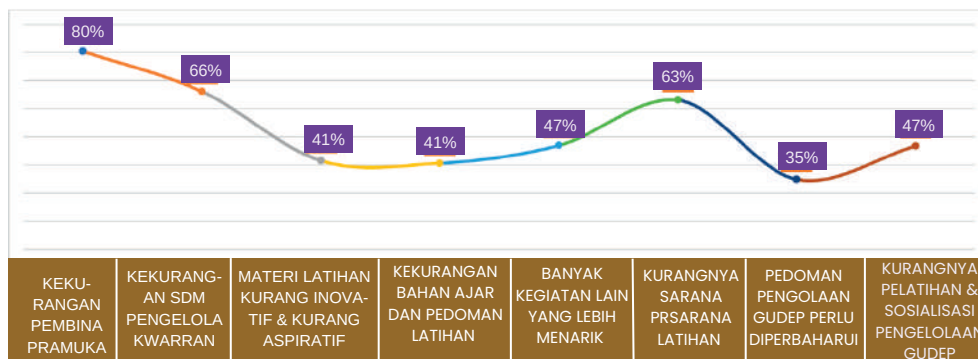
Dari hambatan yang terjadi maka arah pengembangan kemampuan Kwarran didalam menjalin kerjasama kemitraan adalah penerbitan regulasi atau panduan yang implementatif. Peningkatan kapasitas SDM serta peningkatan sosialisasi program-unggulan Gerakan Pramuka kepada masyarakat luas.

ARAH PENGEMBANGAN PERAN KWARRAN DALAM PEMBINAAN GUGUS DEPAN

Berdasarkan data yang telah diemukakan sebelumnya, peran Kwarran dalam pembinaan gugus-depan sudah cukup optimal. Namun demikian masih ada ruang pengembangan terutama dalam hal peningkatan kualitas pembinaan. Dalam survei ini disampaikan 8 hambatan pengembangan gugus depan. Data tanggapan responden terhadap pertanyaan ini sbb :

Faktor-faktor lain yang berkaitan langsung dengan kualitas pembinaan peserta didik di gugus depan yang dianggap cukup menghambat oleh para responden adalah, materi kepramukaan yang kurang inovatif dan aspiratif atau sejalan dengan aspirasi peserta didik, kurangnya bahan ajar atau pedoman latihan kepramukaan serta mulai banyaknya kegiatan lain yang lebih menarik. 40% lebih responden yang menyatakan adanya hambatan - hambatan ini.

Faktor penghambat lain yang terkait dengan tata kelola gudep maupun



Grafik 11:4
Hambatan Pembinaan Gudep oleh Kwarran
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

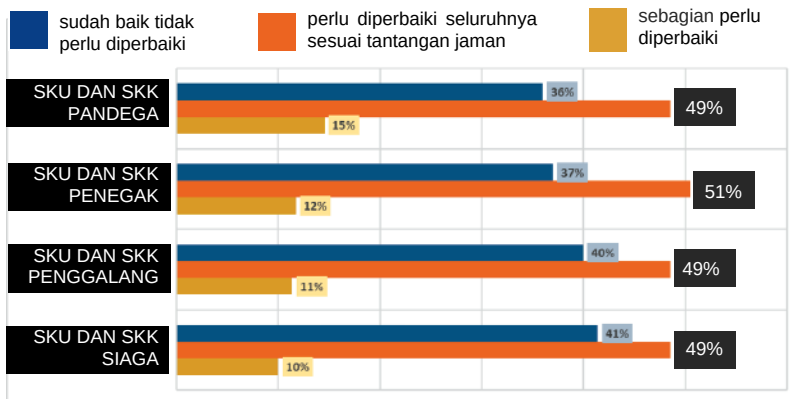
Berdasarkan data 11:4 di atas, hambatan terbesar dalam pembinaan Gudep adalah kurangnya SDM Pembina dan SDM Pengelola Kwarran. Kedua faktor ini dinyatakan oleh 80% dan 66% responden. Hambatan kedua yang dominan adalah kurangnya sarana prasarana latihan kepramukaan, sebagaimana diakui oleh 63% responden.

Kwartir Ranting adalah perlunya pembaharuan pedoman dan kurangnya pelatihan serta sosialisasi pengelolaan gugusdepan. Arah pemecahan berbagai hambatan ini adalah penyempurnaan regulasi, inovasi materi latihan, perbaikan pedoman, peningkatan pelatihan serta sosialisasi yang lebih luas dan tepat sasaran.

ARAH PENGEMBANGAN MATERI SKU DAN SKK

Terkait dengan hal ini, survei memetakan pendapat responden terhadap SKU dan SKK Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega. Kepada responden diberikan tiga pilihan respon yaitu sudah baik tidak perlu diperbaiki, perlu diperbaiki sesuai tantangan jaman, sebagian perlu diperbaiki. Terhadap hal ini data survei menemukan hal-hal sbb :

Jika dilihat lebih jauh antara 49% sampai 51% responden menyatakan SKU dan SKK untuk semua jenjang perlu diperbaiki secara menyeluruh disesuaikan dengan perkembangan jaman. 36% - 41% menyatakan SKU dan SKK sudah baik tidak perlu diperbaiki. Dengan komposisi data semacam ini, maka arah perbaikan dan pengembangan SKU dan SKK memerlukan kajian lebih lanjut agar perbaikannya dapat mendekati kebutuhan atau tuntutan di lapangan.

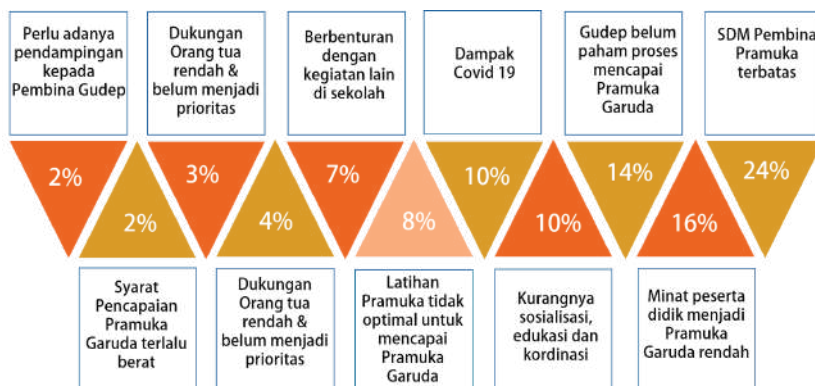


Grafik 11:5
Arah Pengembangan SKU dan SKK Pramuka
Data Survei Kwaran se Jawa & Bali, tahun 2021

Dari data di atas, responden yang menyatakan SKU dan SKK sebagian perlu diperbaiki, relatif kecil antara 10% sampai 15%. Sebaliknya antara responden yang menyatakan "sudah baik tidak perlu diperbaiki" dengan responden yang menyatakan "perlu diperbaiki sesuai tantangan jaman" selisih sedikit, khususnya SKU dan SKK Siaga dan Penggalang. Sedangkan untuk SKU dan SKK Penegak Pandega selisihnya cukup besar.

ARAH PENGEMBANGAN PENCAPAIAN PRAMUKA GARUDA

Untuk mengetahui hambatan dan arah pengembangan pencapaian Pramuka Garuda sebagai program nasional, survei ini memberikan pertanyaan terbuka kepada para responden. Data jawaban responden tentang hal ini jika diklasifikasi, akan menjadi sbb :

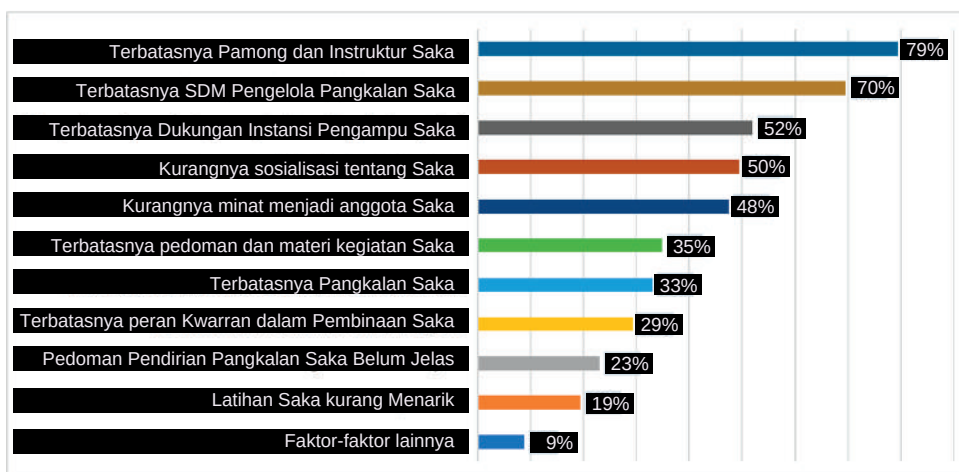


Grafik 11:6
Hambatan Pencapaian Pramuka Garuda
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021

Dari data pada grafik 11:6 hambatan pencapaian Pramuka Garuda cukup kompleks, karena hambatannya ada yang berasal dari peserta didik, dari para pembina, sikap orang tua, kesibukan sekolah, hingga sarana dan prasarana latihan. Dengan demikian arah pengembangan pencapaian Pramuka Garuda memerlukan perbaikan dari aspek kebijakan, pengembangan SDM hingga pemenuhan sarana dan prasarana latihan.

HAMBATAN DAN ARAH PENGEMBANGAN SATUAN KARYA PRAMUKA

Untuk mengetahui hambatan dan arah pengembangan SAKA, survei ini memberikan pertanyaan terbuka kepada para responden. Data jawaban para responden tentang hambatan pembinaan Satuan Karya Pramuka di Kwarrir Ranting jika jika diklasifikasi, menjadi sbb :



Grafik 17:16
Hambatan Pembinaan Satuan Karya oleh Kwarran
Data Survei Kwarran se Jawa & Bali, tahun 2021